

## **Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi Dan Nac) Pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah**

**Salsa Maulida**

*Jurusan Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,  
salsamaulida04@gmail.com*

### **Abstract**

The purpose of the author conducting this research is to find out how the implementation of the PANGKASEPNA policy at the Office of PT PLN (Persero) Central Java Transmission Main Unit, with descriptive qualitative research methods, the results of this study indicate that the PANGKASEPNA policy at the Office of PT PLN (Persero) UIT JBT has been established and implemented since April 10, 2023 with the aim of identifying and reducing waste in the production and operational processes, as well as optimizing the use of available resources. By using the dimensions according to Edward III, namely, communication, resources, disposition or attitude of implementers, and bureaucratic structure. In implementing the PANGKASEPNA policy, the Ranger Leader who leads the COC (Code of Conduct) will fill in material regarding the efficiency of BPP and NAC which is then realized through all employees, then weekly evaluations will be carried out (supervision and evaluation of AO absorption), and guidance will be given by the HST Head Office division in controlling operational costs. In addition, the NAC component at the Office of PT PLN (Persero) UIT JBT is divided into four aspects including consumption costs, SPPD, stationery purchases, and printed matter. Thanks to the implementation of the PANGKASEPNA culture, the Office of PT PLN (Persero) UIT JBT received the best business unit award in the category of budget management and reporting.

**Keywords:** *Policy Implementation, PANGKASEPNA, PLN UIT JBT,*

### **Abstrak**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PANGKASEPNA pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PANGKASEPNA di Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT telah ditetapkan dan dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2023 dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan operasional, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan menggunakan dimensi menurut Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan PANGKASEPNA Ranger Leader yang memimpin COC (Code Of Conduct) akan mengisi materi mengenai efisiensi BPP dan NAC yang kemudian di realisasikan melalui seluruh pegawai, kemudian akan dilakukan evaluasi mingguan (pengawasan dan evaluasi penyerapan AO), serta akan diberikan panduan oleh divisi HST Kantor Pusat dalam pengendalian biaya operasional. Selain itu komponen NAC pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT terbagi menjadi empat aspek diantaranya seperti biaya konsumsi, SPPD, pembelian ATK, dan barang cetakan. Berkat pelaksanaan budaya PANGKASEPNA Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT mendapat penghargaan unit perusahaan terbaik dengan kategori pengelolaan dan pelaporan anggaran.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, PANGKASEPNA, PT PLN UIT JBT

## **Pendahuluan**

Dalam penyelenggaraan segala kegiatan dalam instansi, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi maupun unsur yang sangat menentukan keberlangsungan instansi, sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan dari unsur administrasi dan keuangan. Secara sempit administrasi dapat di artikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan surat-menyurat, dokumentasi, kerasipan, maupun registrasi. Sedangkan secara luas dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh minimal dua orang guna mencapai tujuan yang sama. Sedangkan keuangan merupakan Keuangan yaitu pengelolaan segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan (Anggara, 2016). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi keuangan merupakan segala kegiatan yang minimal dilakukan oleh dua orang dalam melakukan pengelolaan segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu perusahaan yang menerapkan administrasi keuangan tersebut adalah PT PLN (Persero). Kantor PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, tidak akan terlepas dari tantangan besar dalam mengelola biaya pokok produksi dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Demi menagani tantangan besar tersebut PT PLN (Persero) mengeluarkan suatu kebijakan terkait pengendalian biaya. Kebijakan pengendalian biaya PT PLN (Persero) tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika implementasi kebijakan tersebut buruk. Secara garis besar implementasi kebijakan adalah suatu bentuk implementasi kebijakan yang disepakati berdasarkan peraturan yang ada dan dilakukan secara kolaboratif antara pemangku kepentingan sektor publik dan swasta, aktor dan organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan bersama-sama untuk mengubah keadaan ke arah tertentu yang diinginkan (Kamasan et al., 2019).

Sebuah kebijakan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga memiliki dampak dan tujuan yang diharapkan menurut Winarno (Br Tarigan & Sihombing, 2023). Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan melalui dua pilihan. Pertama. Melalui implementasi langsung dalam bentuk terprogram. Kedua, mengimplementasikan melalui formulasi kebijakan turunan atau implementasi kebijakan publik turunan. (Finamore et al., 2021). Mulyadi mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Ani et al., 2020). Kebijakan pada Kantor PT PLN (Persero) mengenai pengendalian biaya atau lebih sering disebut dengan NAC (Non-Allowed Cost) dengan tujuan perlu dilakukannya efisiensi serta pengendalian biaya yang optimal sebagaimana hal tersebut ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggung jawaban Subsidi Listrik (Kementerian Keuangan RI, 2019). Selain itu Kantor Pusat PT PLN (Persero) meminta agar pengendalian NAC (Non-Allowable Cost) Tenaga Listrik dapat dilaksanakan secara tertib dan konsekuen di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, serta perlu disusun pedoman penetapan biaya administrasi di Lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT.

Dengan adanya perintah dari kantor pusat terkait NAC maka Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT membuat produk kebijakan turunan yang bernama PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi dan NAC) yang dimana kebijakan ini untuk memberikan rekomendasi dan solusi dari melonjaknya tinggi anggaran biaya harus dikeluarkan. Implementasi kebijakan PANGKASEPNA bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan operasional, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Maka pentingnya artikel ini untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan PANGKASEPNA dapat meningkatkan efisiensi operasional dan Biaya di PT PLN (Persero) UIT JBT.

Dengan mengurangi kemubaziran biaya, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Dengan memaksimalkan efektivitas kebijakan PANGKASEPNA akan membantu dalam mengendalikan biaya pokok produksi yang merupakan komponen besar dari tarif listrik, PT PLN (Persero) dapat meningkatkan keberlanjutan finansialnya. Pengurangan kemubaziran biaya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PANGKASEPNA pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT, mengidentifikasi efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi kemubaziran biaya pokok produksi dan memastikan alokasi biaya yang lebih efisien, dengan berdasarkan teori implementasi kebijakan dimensi Edwards III. Edward III memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis, terdapat banyak faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor ini dapat menjadi alat ukur keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut diantaranya (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi (Humairoh & Utomo, 2021). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan yaitu Kantor Induk PT PLN (Persero) UIT JBT serta pihak lainnya seperti peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi, masukan, serta evaluasi khususnya kepada peneliti yang akan melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pangkasepna pada Kantor Induk PT PLN (Persero) UIT JBT.

## **Metode**

Penelitian dengan pembahasan implementasi kebijakan PANGKASEPNA menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terstruktur karena di pandang sesuai dengan yang dilakukan peneliti untuk menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kebijakan PANGKASEPNA pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah yang kemudian akan di evaluasi menggunakan kata kata secara deskriptif (Sugiyono, 2000).

Sumber data yang dikumpulkan peneliti melalui beberapa tahapan dan menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer di dapatkan oleh peneliti melalui observasi lapangan yang berupa dokumen dokumen penting mengenai kebijakan PANGKASEPNA, Nota Dinas PANGASEPNA, SK Penetapan GM No 0045 mengenai pengendalian dan Efisiensi Biaya serta hasil wawancara dengan dua informan yaitu Bapak Cucu Kurniawan selaku Asisten Manajer Sub Bidang Umum dan Bapak Agus Martua H.S selaku Staff Bidang Umum. Sedangkan data sekunder sekunder diperoleh melelaui beberapa referensi seperti arsip-arsip, jurnal, artikel, peraturan Menteri, peraturan pemerintah mengenai PT PLN (Persero), serta sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah yang beralamat Komp PLN/GI. Cigereleng, Jl. Moch. Toha No.KM 04, Ciseureuh, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40255.

## Hasil dan Pembahasan

### ***Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA Pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah***

Kebijakan PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi dan NAC) pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT merupakan produk dari kebijakan Kantor Pusat yaitu NAC (Non-Allowed Cost), hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan operasional, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan untuk memenuhi perintah dari Kantor Pusat bahwa kebijakan pengendalian NAC (Non-Allowed Cost) dapat dilaksanakan dan di implementasikan secara tertib dan konsekuen di lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan PANGKASEPNA pada kantor PT PLN (Persero) UIT JBT berdasarkan pada yang telah dilaksanakan sejak 10 April 2023. Agar dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut maka dapat diukur dengan menggunakan model Edward III, yaitu:

### ***Komunikasi Kebijakan PANGKASEPNA Pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah***

Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi dan NAC) pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah berdasarkan dimensi komunikasi dapat diuraikan kedalam beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya penyaluran komunikasi dalam melaksanakan kebijakan PANGKASEPNA pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT.
2. Adanya kejelasan dalam melaksanakan kebijakan PANGKASEPNA pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT.
3. Adanya konsistensi dalam pengimplementasian kebijakan PANGKASEPNA pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan ketiga indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT mengenai implementasi kebijakan PANGKASEPNA dalam dimensi komunikasi sudah berjalan dengan efektif dan efisien sebab seluruh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan PANGKASEPNA sudah tersampaikan dengan baik, baik berupa sosialisasi antara Kantor Induk PT PLN (Persero) UIT JBT dengan UPT-UPT PT PLN (Persero) maupun melalui Surat Keterangan General Manjer dan Nota dinas mengenai Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA. Komunikasi yang berjalan secara efektif dan efisien dalam implementasi kebijakan PANGKASEPNA terbukti dengan adanya turut andil dari UPT-UPT PT PLN (Persero) untuk turut melaksanakan kebijakan tersebut.

Temuan peneliti ini sesuai dengan pendapat Edward III bahwa Keberhasilan suatu sasaran dalam melaksanakan kebijakan publik bergantung pada komunikasi. Implementasi yang baik akan berhasil bila pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan (Hernawati, 2019). Terlepas dari apa yang diimplementasikan hal ini akan berhasil jika komunikasi internal berjalan dengan baik dan setiap keputusan kebijakan dapat tersampaikan dengan tepat. Berdasarkan teori di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang sukses memerlukan komunikasi yang terbuka, baik dan jelas, serta faktor-faktor lain seperti partisipasi seluruh karyawan dan TAD (Tenaga Alih Daya). Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah bahwa komunikasi merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan sebab jika dari segi komunikasi sudah mengalami kesalahan maka akan memiliki dampak dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan (Amjah et al., 2022).

### ***Sumber Daya Kebijakan PANGKASEPNA Pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah***

Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi dan NAC) pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT berdasarkan dimensi sumber daya dapat diuraikan kedalam beberapa indikator, yaitu:

1. Terdapat PIC serta pegawai pada setiap pengendalian BPP (Biaya Pokok Produksi) seperti konsumsi, alat cetakan, alat tulis kantor, dan SPPD.
2. Adanya informasi dari Ranger Leader mengenai efisiensi BPP dan NAC.
3. Adanya wewenang untuk pengendalian komponen NAC seperti konsumsi, alat cetakan, alat tulis kantor, dan SPPD.
4. Terdapat fasilitas penunjang dalam implementasi kebijakan PANGKASEPNA seperti COC (*Code Of Conduct*) pengisian materi mengenai PANGKASEPNA, zoom meeting untuk melakukan evaluasi mingguan, whats app grup untuk memonitor lajunya pengendalian biaya.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan ke-empat indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT mengenai implementasi kebijakan PANGKASEPNA dalam dimensi sumber daya telah dimanfaatkan dan dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana fungsinya hal ini terbukti dengan adanya aktivitas TAD yang turut mendukung pengendalian biaya seperti bertanggung jawab atas berbagai aktivitas yang memastikan keberlangsungan, keandalan, dan efisiensi sistem kelistrikan, yaitu mematikan listrik saat pegawai tidak ada di kantor, memanfaatkan kertas yang gagal dicetak, menjaga dan menata perkakas agar tidak pecah atau rusak, tidak menghidupkan mesin mobil jika sedang menunggu.

Edward III mengatakan bahwa dalam indikator sumber daya terdapat beberapa indikator didalamnya salah satunya, yaitu pegawai. pegawai merupakan sumber daya manusia paling utama dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Hal yang dapat menjadi kegagalan dalam keberlangsungan implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh human error, serta pegawai yang tidak kompeten dibidangnya. Diperlukan staf yang kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan publik (Humairoh & Utomo, 2021). Berdasarkan keempat indikator tersebut, indikator staf merupakan yang paling utama sebab implementasi kebijakan PANGKASEPNA dapat dengan mudah dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten di lapangan, namun implementasi kebijakan PANGKASEPNA menjadi sulit dilaksanakan jika tidak adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh bidan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis bahwa sumber daya manusia yang berkompeten merupakan salah satu kunci dalam implementasi kebijakan, bahkan implementasi kebijakan tersebut kemungkinan tidak dapat berjalan jika terdapat sumber daya manusia yang tidak berkompeten di bidangnya (Hernawati, 2019).

### ***Disposisi atau Sikap Pelaksana Kebijakan PANGKASEPNA Pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah***

Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi dan NAC) pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT berdasarkan dimensi disposisi atau sikap pelaksana dapat diuraikan kedalam beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Ranger Leader mengenai anggaran operasi (Penyerapan AKO)
2. Adanya panduan dari Divisi HST Kantor Pusat PT PLN (Persero)

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kedua indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa disposisi pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT mengenai implementasi kebijakan

PANGKASEPNA dalam dimensi disposisi telah berjalan sebagaimana mestinya sebab Budaya PANGKASEPNA tidak hanya dilaksanakan pada Kantor Induk UIT JBT saja tetapi diimplementasikan pula pada Kantor Unit UPT sehingga Ranger KI, UPT beserta alihdaya bersama sama melakukan internalisasi program budaya PANGKASEPNA dan melakukan pengawasan penyerapan dan pengelolaan operasi (Penyerapan AKO) serta dilakukan evaluasi mingguan melalui zoom meeting (pengawasan dan evaluasi penyerapan AO) yang rutin dilakukan setiap satu bulan sekali. Dalam melaksanakan evaluasinya dilakukan sesuai dengan panduan dari Divisi HST Kantor Pusat. Berkat pelaksanaan budaya PANGKASEPNA Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT mendapat penghargaan unit perusahaan terbaik dengan kategori pengelolaan dan pelaporan anggaran.

Edward III mengemukakan, Disposisi adalah komitmen pihak implementator suatu kebijakan atau program terhadap pelaksanaannya. Sebab, setiap strategi memerlukan pelaksana yang memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan yang diharapkan (Hernawati, 2019). Berdasarkan teori diatas, dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan PANGKASEPNA perlu adanya komitmen yang kuat dari divisi HST Kantor Pusat selaku pembuat kebijakan NAC dan Ranger Leader selaku pengawas dalam anggaran operasional Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT. Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh bidan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis bahwa keinginan kuat dan kesungguhan para pelaksana akan menjamin terlaksananya implementasi kebijakan tersebut, sehingga mengharuskan pelaksana kebijakan memiliki sikap proaktif agar strategi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan (Hernawati, 2019).

### ***Struktur Birokrasi Kebijakan PANGKASEPNA Pada Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah***

Implementasi Kebijakan PANGKASEPNA (Pengurangan Kemubajiran Biaya Pokok Produksi dan NAC) pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT berdasarkan dimensi struktur birokrasi dapat diuraikan kedalam beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya Standar Operasional (SOP) dalam implementasi kebijakan PANGKASEPNA
2. Adanya alur pembagaian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas dalam implementasi kebijakan PANGKASEPNA

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kedua indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT mengenai implementasi kebijakan PANGKASEPNA dalam dimensi struktur birokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya sebab hal ini jelas dipaparkan dalam program kerja pengendalian NAC dimana hal ini merujuk pada serangkaian inisiatif dan tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi kerugian non-teknis dalam distribusi dan penjualan listrik. Setiap program kerja pengendalian NAC memiliki dampak yang baik bagi kantor seperti pada program fakta Komitmen Bersama Pengendalian NAC dampaknya Manajemen unit menjadi panutan dalam efisiensi dan efektivitas BPP, Program Membedah Rincian Biaya sesuai dengan aktivitasnya dampaknya Identifikasi Biaya yang berhubungan dengan Kegiatan Tenaga Listrik.

Edward III mengatakan bahwa struktur organisasi yang lemah dapat membuat implementasi kebijakan tidak terlaksana atau terealisasikan sebab ketika suatu birokrasi bertentangan dengan kebijakan yang ada, sumber daya yang ada mungkin tidak berfungsi dan dengan baik implementasi kebijakan mungkin terhambat. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrat dituntut untuk mampu mendukung kebijakan yang diambil dengan koordinasi yang tepat (Humairoh & Utomo, 2021). Berdasarkan teori diatas pelaksanaan implementasi kebijakan PANGKASEPNA diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan baik itu dari segi SOP ataupun

dari segi pembagian tugas dan pertanggungjawaban sebab kedua hal tersebut merupakan indikator dimensi yang penting dalam menyatukan indikator lainnya pada dimensi sebelumnya baik itu komunikasi, sumber daya, dan disposisi, dengan SOP yang tidak dijalankan serta tidak adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban implementasi kebijakan PANGKASEPNA akan berjalan secara berantakan dan tidak tertata. Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu mengenai implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh bidan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis bahwa SOP dan pembagian tugas yang jelas akan menghasilkan implementasi kebijakan yang optimal (Hernawati, 2019).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PANGKASEPNA telah ditetapkan dan dilaksanakan di Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT sejak tanggal 10 April 2023. Implementasi kebijakan PANGKASEPNA bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan operasional, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan untuk memenuhi perintah dari Kantor Pusat bahwa kebijakan pengendalian NAC (Non-Allowed Cost) dapat dilaksanakan dan di implementasikan secara tertib dan konsekuen di lingkungan PT PLN (Persero) UIT JBT. Dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam implementasi kebijakan PANGKASEPNA perlu mengikuti SOP yang berlaku dan mengikuti alur pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan selain itu, Ranger Leader yang memimpin COC (Code Of Conduct) akan mengisi materi mengenai efisiensi BPP dan NAC yang kemudian di realisasikan melalui seluruh pegawai untuk mendukung budaya efisiensi biaya, serta dilakukan evaluasi mingguan melalui zoom meeting (pengawasan dan evaluasi penyerapan AO), memonitoring penyerapan anggaran setiap harinya melalui whats app grup yang telah disediakan serta akan diberikannya panduan oleh divisi HST Kantor Pusat dalam pengendalian biaya operasional. Selain itu komponen NAC pada Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT terbagi menjadi empat aspek diantaranya seperti biaya konsumsi, SPPD, pembelian ATK, dan barang cetakan, setiap empat aspek tersebut tentu saja memiliki PIC masing-masing. Berkat pelaksanaan budaya PANGKASEPNA Kantor PT PLN (Persero) UIT JBT mendapat penghargaan unit perusahaan terbaik dengan kategori pengelolaan dan pelaporan anggaran.

### **Referensi**

- Amjah, A., Agustino, L., & Arenawati, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1), 55–60. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.12458>
- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In Cv Pustaka Setia. <https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/11003>
- Ani, L., Mulyadi, J., & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekobisman*, 5(1), 1–16.
- Br Tarigan, E. T. A., & Sihombing, R. S. M. (2023). Implementasi Program Listrik Pintar (Prabayar) di PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 53–60. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3524>

- Finamore, P. da S., Kós, R. S., Corrêa, J. C. F., D, Collange Grecco, L. A., De Freitas, T. B., Satie, J., Bagne, E., Oliveira, C. S. C. S., De Souza, D. R., Rezende, F. L., Duarte, N. de A. C. A. C. D. A. C., Grecco, L. A. C. A. C., Oliveira, C. S. C. S., Batista, K. G., Lopes, P. de O. B., Serradilha, S. M., Souza, G. A. F. de, Bella, G. P., ... Dodson, J. (2021). No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>
- Hernawati, S. (2019). Implementasi Program peningkatan Gizi Bayi dan Balita Oleh bidan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6, 139–151. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2819>
- Humairoh, U., & Utomo, S. J. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Kabupaten Bangkalan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1(2), 23–37. <https://doi.org/10.21107/bep.v1i2.12004>
- Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.4.1.2019.39-46>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Sugiyono. (2000). *Metode Penelitian Administrasi*.